



**SUB BAGIAN HUMAS TU KALAN
BPK SUMBAR**

2 0 1 9

KORAN	HAL
Haluan	1&7
Padang Ekspres	
Singgalang	
Pos Metro	

Tanggal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Bulan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kasus Dari Halaman. 1

dari itu, untuk sekarang kami pelajari dulu kasusnya seperti apa,” ucapnya.

Diduga Ada Aktor Intelektual

Sebelumnya, Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz mendesak penyidik Bareskrim Polri membawa aktor intelektual dalam kasus ini ke meja persidangan. Disebutkan Donal, penyidik harus mempercepat penanganan dan menangkap aktor intelektual dalam kasus yang merugikan negara Rp62 miliar lebih ini. “Ini kasus besar. Bahkan di Sumbar menjadi kasus korupsi yang paling besar. Jangan didiamkan begitu saja. Penyidik punya

utang untuk menuntaskannya, sekaligus mengungkap, siapa dalang atau aktor intelektual dalam kasus ini,” tegas Donal Fariz.

Penelaahan ICW, menurut Donal, Yusafni Ajo, pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sumbar yang sudah divonis dalam kasus ini, diyakini bukan aktor tunggal, atau aktor intelektual. Ia bisa jadi hanya pesuruh. “Kita menyakini dia bukan merupakan aktor intelektualnya, untuk itu penyidik harus segera menangkap dan menghukum aktor intelektual yang menjadi otak dari kasus yang terbesar pernah ada di sumbar ini,” katanya.

Akhir 2018 silam, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri memastikan akan melanjutkan

penyelidikan kasus dugaan korupsi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fiktif awal tahun 2019 ini. Jika bisa diungkap lebih dalam, misteri penikmat uang korupsi senilai Rp 62,5 miliar di Dinas Prasarana Jalan Tataruang dan Pemukiman (Prasjaltarkim) Sumbar itu tak hanya Yusafni Ajo yang sudah mendekam di Lapas. Hanya saja, hingga saat ini belum diketahui sejauh mana langkah penyelidikan kasus ini sudah dilakukan

Direktur Pusako Unand, Feri Amsari kepada Haluan dalam edisi sebelumnya mengaku sudah menyurati KPK agar mensupervisi kasus ini menyusul belum jelasnya perkembangan penanganan kasus yang diawali dengan temuan BPK tersebut. **(h/mg-dan)**